

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF GUNA MEWUJUDKAN
ASPIRASI MASYARAKAT PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Adelia Khansa
NPP. 29.328

*Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Fakultas Politik Pemerintahan*

Email: adeliaKhansa@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statment/Background (GAP): Development planning using a participatory approach is a way to achieve the expected development of the community. In line with this, this study was conducted to find out how "PARTICIPATORY DEVELOPMENT PLANNING TO REALIZE THE COMMUNITY'S ASPIRATIONS IN THE REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY OF MUSI BANYUASIN REGENCY".

Purpose: The purpose of this study is to obtain an overview of the implementation of participatory development planning in Musi Banyuasin Regency, obtain an overview of the supporting factors and constraint factors in participatory development planning and obtain an overview of the efforts made by the Regional Development Planning Agency of Musi Banyuasin Regency in solving obstacles and utilizing supporting factors. **Method:** This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The data collection technique used is triangulation between interviews, observation, and documentation. The data analysis technique uses data reduction using data reduction, data presentation, and data verification to make conclusions. **Result:** The results showed that in general the participatory development planning at the Regional Development Planning Agency of Musi Banyuasin Regency based on the aspects of actors, knowledge, and spaces was good. However, there are still several factors that hinder the implementation of participatory development planning. **Conclusion/sugegestion:** There needs to be an effort made by the Regional Development Planning Board of the Musi Banyuasin Regency to realize the aspirations of the community in development planning.

Keywords: *Participatory development planning, community participation*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Perencanaan pembangunan dengan menggunakan pendekatan partisipatif merupakan cara dalam mencapai pembangunan yang diharapkan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana “PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF GUNA MEWUJUDKAN ASPIRASI MASYARAKAT PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN”. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Musi Banyuasin, memperoleh gambaran faktor pendukung dan faktor kendala pada perencanaan pembangunan partisipatif serta memperoleh gambaran upaya-upaya yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam memecahkan kendala dan memanfaatkan faktor pendukung. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi antara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data untuk membuat kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan secara umum perencanaan pembangunan partisipatif di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan aspek actors, knowledge, dan spaces telah baik. Hanya saja masih terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif., **Kesimpulan dan Saran:** Perlu adanya upaya yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mewujudkan aspirasi masyarakat pada perencanaan pembangunan.

Kata Kunci: *Perencanaan pembangunan partisipatif, partisipasi masyarakat*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses pertumbuhan dan perubahan secara sadar oleh suatu negara untuk mencapai sebuah keadaan dan situasi yang lebih baik dari sebelumnya, dengan terencana dan terarah guna pembinaan pada bangsa. Negara Indonesia, saat ini, tengah semarak dalam pelaksanaan pembangunan yang pada hakikatnya memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Hal ini dalam mendukung tujuan Bangsa Indonesia yang dituangkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945, maka dibentuk kebijakan nasional dimana menyangkut adanya sistem pemerintahan desentralisasi yang merupakan peluang kepada seluruh pemerintah daerah khususnya kabupaten kota untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kondisi, kemampuan, karakteristik masing masing daerah yang bersangkutan. Pentingnya peran masyarakat di

Indonesia dalam pembangunan yang berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui proses demokrasi merupakan hasil masukan dan saran dari berbagai pihak. Masukan-masukan yang lebih dikenal dengan aspirasi masyarakat merupakan sebuah ide ataupun gagasan yang berpengaruh pada tahapan pembangunan. Aspirasi masyarakat dalam pembangunan berfungsi dalam proses pembentukan pembuatan gagasan agar lebih terarah dan mengetahui perkembangan yang terjadi di wilayah masyarakat. Pembangunan yang terarah pelaksanaannya memerlukan sebuah perencanaan yang mampu mewujudkan aspirasi dari masyarakat tersebut. Melalui sistem perencanaan pembangunan nasional yang menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan dimana perencanaan pembangunan ini dilaksanakan oleh berbagai pihak penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat ataupun daerah. Penyampaian aspirasi dalam perencanaan pembangunan dapat dilakukan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Musrenbang menjadi wadah bagi berbagai pihak masyarakat untuk terlibat dalam sistem perencanaan dan anggaran pada pelaksanaan pembangunan. Proses pelaksanaan musrenbang dimulai dari Tingkat kelurahan, Tingkat Kecamatan, Tingkat Kota atau Kabupaten, Tingkat Provinsi, hingga Tingkat Nasional. Pelaksanaan proses perencanaan pembangunan pada daerah yang berkaitan pada prosesnya menggunakan empat pendekatan, pendekatan teknokratik melalui metode dan kerangka berpikir, pendekatan partisipatif dengan melibatkan stakeholders, pendekatan politis dengan menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih, serta pendekatan topdown dan bottom-up yang diselenggarakan melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mencapai aspirasi masyarakat dengan memperhatikan peran berbagai pihak masyarakat dalam melaksanakan perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif yang lebih memperhatikan kesempatan masyarakat menyampaikan aspirasi. Oleh sebab itulah pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif sangat diperlukan. Artinya pendekatan perencanaan pembangunan akan sesuai harapan dari pemerintah dan seluruh masyarakat di daerah tersebut dengan mengkombinasikan pendekatan Top-Down dan Bottom-Up. Perencanaan pembangunan dengan menggunakan pendekatan partisipatif merupakan cara dalam pencapaian pembangunan yang diharapkan masyarakat. Dimana semua stakeholder bersama-sama menentukan program pembangunan yang diharapkan untuk mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan partisipatif yang dilaksanakan pemerintah daerah mengarah pada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat salah satunya dilakukan dengan pelaksanaan musrenbang sebagai tahapan penyusunan pada tingkat kelurahan hingga tingkat provinsi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

kendala dalam proses perencanaan pembangunan ialah mekanisme prosedur dalam musrenbang daerah yang tidak dijalankan dengan baik serta pembatasan keuangan bagi pembangunan daerah.⁹ Maka dari itu pentingnya peran dari tiap pemangku kepentingan (Stakeholders) dalam berjalannya proses perencanaan pembangunan untuk saling bekerjasama dari pihak pemerintah daerah dan pihak swasta serta pentingnya aspirasi dan

partisipasi dari masyarakat sepenuhnya dapat terlaksana demi meningkatkan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian pertama Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. (Suwandi, Dewi Rostyaningsih Tahun 2012 di Cirebon). Tujuan penelitian Untuk menganalisis proses perencanaan pembangunan Dan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Variabel Penelitian Perencanaan pembangunan partisipatif. Teori yang digunakan Teori perencanaan (Terry). Metode penelitian Interactive model analysis. Temuan penelitian Proses pelaksanaan pembangunan belum berjalan baik dan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat belum berjalan. Penelitian yang kedua yang berjudul Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kutamandiri Tahun 2015- 2021) (Indri Novian Tahun 2016).

1.4. Pernyataan Kebaruan Penelitian

Teori yang digunakan dalam penelitian, dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan kesamaan judul penelitian seperti judul yang diambil penulis. Namun penulis akan mengikat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian terhadap penelitian yang dilakukan penulis.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Perencanaan Pembangunan Partisipatif Guna Mewujudkan Aspirasi Masyarakat Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuasin

II. METODE

Dalam Buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Sugiyono (2020 : 2) mengemukakan bahwa, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian digunakan sebagai cara seorang penulis dalam menemukan data dan tujuan dalam melakukan sebuah penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Standar data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah data faktual yang sebenarnya terjadi di lapangan sebagaimana adanya. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data tidak bertumpu kepada teori atau pun hipotesis, namun oleh fakta-fakta yang didapat oleh penulis ketika melaksanakan penelitian di lapangan. Maka dari itu analisis data yang dilakukan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan penulis dan kemudian dapat disimpulkan menjadi hipotesis atau teori, sehingga dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan untuk membentuk sebuah hipotesis. Obyek dalam penelitian kualitatif adalah

obyek yang alamiah atau natural. Obyek alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh penulis dan kehadiran penulis tidak berpengaruh terhadap dinamika pada obyek yang diteliti, sehingga metode penelitian ini disebut juga sebagai metode naturalistik. Menurut Sugiyono (2018 : 9) dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, menjelaskan pengertian metode kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis. Menurut Sugiyono (2018 : 23) dalam Buku Metode Kualitatif, tujuan utama dari metode penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan mengeksplorasi fenomena utama pada obyek yang diteliti, sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam dan menemukan sesuatu yang unik. Sehingga data yang didapatkan ketika melakukan penelitian di lapangan adalah data yang sederhana sehingga mudah dipahami. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif sehingga dapat menjelaskan fakta-fakta secara rinci sesuai dengan kenyataan di lapangan. Setelah penulis melaksanakan analisis yang menyeluruh dari semua data dan informasi yang telah didapat, maka penulis dapat mengambil kesimpulan umum sesuai dengan fakta dan teori-teori yang disampaikan. Hasil akhir dari analisis data yang telah dilakukan penulis dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat, bahkan dapat menjadi hipotesis atau ilmu baru yang dapat dijadikan solusi dalam mengatasi masalah dan meningkatkan derajat hidup manusia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian akan diuraikan sesuai 3 (tiga) hal pokok yang tertera pada perumusan masalah. Hal-hal tersebut adalah pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Musi Banyuasin, faktor pendukung dan penghambat perencanaan pembangunan partisipatif, serta upaya badan perencanaan pembangunan daerah dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Musi Banyuasin.

3.1 Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kabupaten Musi Banyuasin.

Pada subbab ini akan dipaparkan hasil penelitian, berikut pembahasannya: Analisis ini didasarkan pada data yang sudah di tarik melalui tiga teknik pengumpulan data sebagaimana yang telah di jelaskan pada bab tiga. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori perencanaan pembangunan partisipatif oleh McGee yang meliputi dimensi dimensi sebagai berikut: Actors, Knowledge, Spaces.

1. Dimensi Actors

Dimensi Actors akan diukur dengan empat kriteria yaitu, kemauan politik penguasa dalam melibatkan masyarakat, percaya diri, pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan, dan kewenangan. Kemauan politik dari pejabat pemerintahan

Kabupaten Musi Banyuasin sebagai fasilitator kegiatan perencanaan pembangunan dalam melibatkan masyarakat untuk memberikan aspirasinya terhadap kebutuhan dan kepentingan daerah di Kabupaten Musi Banyuasin dapat terlihat pada pelaksanaan musrenbang yang telah melibatkan semua komponen pemangku kepentingan seperti masyarakat dan stakeholders, serta tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh perempuan yang selalu dilibatkan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Masyarakat dapat dengan leluasa dan percaya diri memberikan aspirasi dan keinginannya dalam mewujudkan perubahan kearah yang lebih baik tanpa ada rasa takut aspirasinya tidak terpenuhi. Dikarenakan pemerintah perlu mengetahui masalah dan kebutuhan masyarakat di berbagai tingkat wilayah daerah agar dapat dilakukan perubahan dan segera terlaksana keinginan masyarakat melalui berbagai proses. Dalam keberhasilan proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten dapat diperoleh melalui kegiatan penyelidikan, yaitu proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan masalah dan kebutuhan masyarakat. Hal ini bertujuan agar memperoleh daftar masalah yang perlu diseleksi lebih lanjut untuk dipilih mana masalah dan kebutuhan yang dianggap penting dan mendesak untuk dijadikan usulan prioritas dalam tahapan musrenbang. Sebelum menyeleksi aspirasi yang merupakan masalah dan kebutuhan, terlebih dahulu dilaksanakan review oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa, dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran dan validitas keadaan masyarakat dan lingkungan secara menyeluruh. Maka dapat dikatakan pada dimensi Actors dengan memperhatikan ke empat indikator, kemauan melibatkan masyarakat yang terlaksana dengan baik, memiliki rasa percaya diri terhadap keahlian yang dimiliki dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, pertanggungjawaban yang terlaksana dengan baik serta kewenangan dari Bupati selaku kepala pemerintahan yang menunjang keberhasilan perencanaan pembangunan dengan baik.

2. Dimensi Knowledge

Dimensi knowledge tidak kalah penting dengan dimensi actors dalam perencanaan pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat luas mengenai pengetahuan berjalannya proses perencanaan pembangunan. Dua pengetahuan yang harus diketahui oleh seluruh pelaksana proses perencanaan pembangunan dan stakeholders yang terlibat dalam musrenbang ialah mengenai bahan perencanaan yang bersifat formal seperti statistik, pengetahuan teknis, ilmu akademis baik pemerintahan maupun sosial politik, dan pengetahuan informal yang dimiliki oleh masyarakat berupa pengalaman. Kedua ialah pengetahuan mengenai peraturan atau prosedur perencanaan. Proses perencanaan pembangunan yang membutuhkan berbagai pengetahuan dan pengalaman berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan aspirasi. Hal tersebut terjadi karena masyarakat merasa tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk ikut serta dalam berpartisipasi. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan ialah mengacu pada

PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Setelah perangkat daerah telah memahami system dan proses pelaksanaan maka akan disampaikan kepada berbagai kalangan masyarakat yang akan mengikuti kegiatan musyawarah. Selain melalui sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat sendiri pun cukup aktif untuk mencari tahu informasi mengenai kegiatan musrenbang yang berguna untuk memberikan perubahan kearah yang lebih baik terhadap kesejahteraan masyarakat sendiri. Masyarakat yang aktif dalam forumforum perencanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah didominasi oleh tokoh-tokoh masyarakat yang telah berpengalaman dan memahami dalam keikutsertaan proses perencanaan pembangunan serta keterkaitan stakeholders terhadap tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku Sistem perencanaan di daerah yang melibatkan aspirasi masyarakat untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi di wilayahnya. Dimana terjadi perubahan kondisi lingkungan yang memerlukan perubahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Kemauan masyarakat untuk memberikan aspirasi pada saat perencanaan pembangunan yang berlangsung satu tahun sekali memiliki perkembangan sejalan dengan berjalannya waktu dengan pengetahuan dan kemampuan masyarakat yang berperan aktif untuk ikut serta mengikuti proses perencanaan pembangunan berlangsung. Sikap mental yang dimiliki masyarakat untuk membangun dan ikut serta dalam memperbaiki mutu hidupnya serta wilayah lingkungannya. Masyarakat yang sudah memiliki kesadaran atau kemauan pada dirinya untuk berpartisipasi dan menyampaikan aspirasinya akan memiliki rasa memiliki dan bertanggung jawab akan hasil pembangunan. Berbeda dengan masyarakat yang tidak memiliki kemauan untuk ikut serta berpartisipasi yang cenderung tidak merasakan bagaimana proses pembangunan dapat berjalan dan bagaimana cara menjaga serta bertanggung jawab terhadap hasil pembangunan yang telah dicapai

3. Dimensi Spaces

Pada dimensi Spaces (ruang) terdapat empat kriteria yaitu memanfaatkan sumberdaya, kesempatan partisipasi, serta dana pembangunan. Dalam memanfaatkan sumberdaya pada perencanaan pembangunan untuk keberhasilan yang diinginkan, seorang perencana harus mampu untuk merumuskan perencanaan pembangunan dari berbagai sektor sehingga dituntut memiliki SDM yang baik, yaitu pengetahuan dan wawasan luas dalam pembangunan. Pada pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin pegawai yang berada di Bappeda dengan total pegawai sebanyak 73 orang telah memiliki kompetensi terkait perencanaan dengan memberikan pendidikan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan dan wawasan dalam mengelola perencanaan. Kualitas pegawai yang memiliki kompetensi dalam perencanaan pembangunan sudah baik. Namun kualitas dan kuantitas SDM di tingkat kecamatan dan desa masih rendah. Para pegawai yang

memiliki kompetensi mengenai perencanaan pembangunan masih sangat sedikit. Dalam konteks ini, untuk meningkatkan kualitas aparatur perencanaan baik yang berada di Kabupaten maupun kecamatan dan desa, secara bertahap diprogramkan Pendidikan formal maupun non formal termasuk adanya pelatihan dan diklat. Namun dalam kegiatan pelatihan ini masih terbatas mengingat alokasi anggaran yang tersedia. Proses perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin melibatkan partisipasi masyarakat. Kesempatan dalam partisipasi tersebut dengan tujuan pengendalian pelaksanaan rencana untuk menyelaraskan rencana pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan dari setiap level pemerintahan. Hal ini sesuai dengan langkah ketiga tahapan pertama perencanaan pembangunan yang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 yang berbunyi “melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan”. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin sangat penting. Landasan utamanya karena konsep pembangunan ditujukan agar ada partisipasi masyarakat, khususnya dalam proses perencanaan. Umumnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat dilihat dalam proses musrenbang yang ada di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Berdasarkan penelitian di lapangan, terdapat beberapa alasan mengapa partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan sebagai berikut.

1. Membantu mengarahkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Melalui musrenbang aspirasi masyarakat akan ditampung dan diseleksi sesuai prioritas kebutuhan sehingga program-program pembangunan dapat terwujud dan direalisasikan secara efektif.
2. Membantu menilai rencana pelaksanaan kegiatan atau hasil yang akan dicapai. Masyarakat dapat menilai apakah rencana pembangunan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan yang telah dibahas dalam musrenbang. Dengan demikian, partisipasi juga akan mempererat hubungan antarsesama masyarakat, pemerintah, maupun pihak-pihak lain yang bersangkutan.
3. Meningkatkan efisiensi kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan tidak harus dibuat berulang kali karena sudah melibatkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Membantu memperbaiki status wanita dengan menyediakan kesempatan untuk berperan dalam tahapan pembangunan. Partisipasi merupakan cara efektif dalam membangun dan mengelola kemampuan masyarakat yang tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Wanita dan laki-laki memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan ide atau saran dalam pelaksanaan musrenbang.
5. Menjamin kesinambungan kegiatan pembangunan. Dengan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, masyarakat menjadi aktif

memahami kondisi lingkungan daerahnya serta mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program pembangunan yang telah dilaksanakan.

Ketika penyelenggaraan musrenbang tingkat desa terjadi, kenyataan yang terjadi adalah mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah yang dilaksanakan di tingkat desa ternyata belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam memutuskan prioritas kegiatan. Namun untuk menciptakan perencanaan pembangunan tepat waktu, tetap sasaran, dan berdaya guna dituntut adanya partisipasi masyarakat. Masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang dikehendaki, sehingga keikutsertaan masyarakat dapat mengakomodasi kepentingannya dalam proses penyusunan rencana pembanguana. Dari dimensi Spaces dengan memperhatikan ketiga indikator, dimana badan perencanaan pembangunan daerah telah memanfaatkan sumber daya dengan baik dengan memperhatikan kuantitas pegawai pada tingkat Kecamatan dan desa telah terlaksana dengan baik, dan bappeda telah memberikan kesempatan dalam partisipasi kepada masyarakat serta dana pembangunan yang memadai. Ketiga indikator tersebut telah terlaksana dengan baik.

3.2. Faktor Pendukung dan Faktor Kendala Dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin, penulis menemukan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif. Dilihat dari faktor pendukung timbulnya, timbulnya partisipasi masyarakat merupakan ekspresi dari perilaku manusia itu sendiri untuk melakukan suatu tindakan agar terlibat dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan. Perwujudan dari perilaku tersebut didukung dari perilaku tersebut didorong dengan adanya tiga faktor utama yang mendukung yaitu Actors, Knowladg, dan Spaces. Kemauan dari dalam diri masyarakat itulah yang sebenarnya mendorong seseorang untuk dapat terlibat dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan. Dilihat dari faktor yang menghambat partisipasi masyarakat, terdapat kendala yang berasal dari kepribadian seperti ketergantungan. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif

A. Faktor Pendukung

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat didukung dengan beberapa faktor. Faktor-faktor pendukung tersebut meliputi dukungan dari pemerintah, koordinasi antar instansi, kemauan masyarakat untuk kemajuan pembangunan. Berikut adalah uraian secara lengkap.

1. Dukungan dari Pemerintah

Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan instansi yang berkepentingan dalam proses perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan pembangunan yang telah disusun di bawah koordinasi Bappeda baik program-program pembangunan regular maupun program-program yang baru dirancang dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Hampir seluruh kegiatan program Bappeda ditanggapi dengan baik serta didukung dan dibantu dalam pelaksanaannya oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini sangat membantu bappeda dalam merealisasikan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Mengingat Bappeda merupakan Lembaga unsur penunjang pemerintah daerah guna mendukung Visi Muba Maju Berjaya 2022.

2. Koordinasi Antar Instansi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan koordinasi dengan instansi lain yang memiliki tujuan yang sejalan dengan Bappeda dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan dan menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin. Bappeda sebagai coordinator perencanaan pembangunan harus mampu secara teliti merumuskan program dan melakukan hubungan-hubungan dengan berbagai pihak baik itu legislative, dunia usaha, perguruan tinggi, dan unsur masyarakat, termasuk instansi vertikal seperti Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah, serta harus tanggap terhadap aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah, dan tanggap terhadap perubahan yang terjadi.

3. Kemauan Masyarakat dalam Kemajuan Pembangunan

Masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin memiliki kemauan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Masyarakat berantusias untuk mempersiapkan kegiatan musrenbang. Antusias masyarakat terlihat mulai dari mempersiapkan usulan program kegiatan hingga pelaksanaan musrenbang. Masyarakat memiliki peran dalam merencanakan pembangunan yang ada di daerahnya. Hal ini sejalan dengan harapan yang mengungkapkan pentingnya peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang mana masyarakat akan memiliki rasa percaya terhadap program dan kegiatan pembangunan jika masyarakat dilibatkan mulai dari tahap persiapan dan perencanaan sampai pelaksanaannya. Masyarakat akan lebih mengerti kondisi program dan kegiatan tersebut, serta mempunyai rasa memiliki (sense of belonging). Dengan antusiasme yang masyarakat miliki, masyarakat merasakan hak demokrasi karena memang ada keterlibatan dalam perencanaan pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam musrenbang juga didukung akses menuju tempat terselenggaranya kegiatan musrenbang yang mudah ditempuh oleh masyarakat. Hal ini secara tidak langsung menjadi

faktor yang mendukung masyarakat untuk mengambil bagian dalam kegiatan musrenbang. Kemauan masyarakat untuk kemajuan pembangunan juga ditopang kualitas hidup yang sudah cukup baik, sarana prasarana serta infrastruktur yang memadai, kesadaran dan pemahaman masyarakat yang mampu berpikir maju, serta tradisi dan adat masyarakat Musi Banyuasin yang menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Dalam forum-forum perencanaan pembangunan, kebersamaan ini menjadi perekat dan pendorong bagi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang merupakan wadah penampung ide dan aspirasi masyarakat. Tingkat pendidikan yang baik mempengaruhi masyarakat memahami dan mengerti apa sebenarnya arti penting dan tujuan diperlukannya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Pengalaman adalah hal lain yang juga bisa menutupi kekurangan pada tingkat pendidikan. Semakin sering masyarakat terlibat dalam perencanaan pembangunan, semakin paham pula masyarakat mengenai proses dan sistem pada perencanaan pembangunan. Pada kenyataannya di Kabupaten Musi Banyuasin bahwa walaupun tingkat pendidikan jenjang menengah atas masih terbilang rendah tetapi masyarakat yang terlibat dalam perencanaan pembangunan baik dari tingkat dusun hingga kabupaten yang memiliki pendidikan atau latar belakang pengalaman di bidang perencanaan pembangunan.

B. Faktor Penghambat

Faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Berikut adalah penjelasan dari kedua faktor tersebut.:

1. Faktor Internal

Berikut adalah faktor internal yang menghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

a. Keterbatasan Pengetahuan dan Wawasan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, faktor internal yang menghambat partisipasi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan adalah terbatasnya pengetahuan dan wawasan masyarakat yang masih terbatas. Dikarenakan rendahnya tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang SMA di Kabupaten Musi Banyuasin, dimana masyarakat kurang memahami peran serta mereka dalam perencanaan pembangunan. Hal ini menyebabkan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan kurang optimal karena masyarakat menganggap proses pembangunan yang berlangsung merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah. Padahal untuk mewujudkan pembangunan, partisipasi masyarakat secara aktif dalam perencanaan pembangunan

sangat diperlukan, karena tujuan akhir dari perencanaan pembangunan adalah menciptakan pembangunan yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan pengetahuan dan wawasan masyarakat sangat dipengaruhi tingkat pendidikan masyarakat yang belum memenuhi syarat.keterlibatan pada proses perencanaan pembangunan. Kemudian peristiwa ini menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah pada perencanaan pembangunan yang berlangsung. Yang membuat inisiatif masyarakat menjadi rendah dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan atas prakarsa sendiri.

b. Kurangnya Kesiediaan Masyarakat

Kesiediaan masyarakat yang masih kurang menjadi kendala atau hambatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan pembanguna. Adanya pemikiran dari masyarakat bahwa kegiatan musrenbang sebagai salah satu proses perencanaan pembangunan hanya kegiatan tahunan yang bersifat formalitas tanpa adanya realisasi dan perubahan. Kesiediaan masyarakat dalam partisipasi pada proses perencanaan pembagunan juga dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan musrenbang. Terdapat masyarakat yang bersedia datang namun tidak memberikan aspirasinya dan ada juga yang tidak dapat hadir karena terkendala pada waktu. Berbicara mengenai waktu dalam proses musrenbang yang hanya kurang lebih 2 jam membuat terbatasnya masyarakat dalam memberikan aspirasi ataupun argumentasi mengenai program yang diinginkan.

2. Faktor Eksternal

Hambatan faktor eksternal merupakan hambatan-hambatan dari luar diri masyarakat yang menyebabkan masyarakat kurang berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, berikt adalah penjelasan faktor eksternal.

a) Keadaan Geografis yang Sulit

Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki kondisi wilayah yang luas dan letak geografis yang sulit untuk dijangkau menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas. Beberapa desa dan kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin yang berada di pedalaman dan perbatasan provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi, memiliki akses transportasi yang masih buruk dan juga terdapat kecamatan yang harus melewati jalur air dengan melewati sungai untuk sampai di desa. Hal ini menjadi hambatan bagi bappeda dalam pelaksanaan tugasnya. Masyarakat membutuhkan bantuan transportasi dari pemerintah dan juga perbaikan jalan menuju kecamatan. Kegiatan yang dilaksanakan

di wilayah kecamatan ataupun kabupaten juga menjadi kendala untuk menggapainya.

b) Kuantitas SDM Pegawai Rendah

Pegawai yang berada di Bappeda telah memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai, yang telah memiliki kompetensi mengenai perencanaan pembangunan. Di sisi lain kualitas dan kuantitas SDM di tingkat kecamatan dan desa masih rendah. Pegawai yang memiliki kompetensi mengenai perencanaan pembangunan masih sangat sedikit. Hal ini terkadang menyulitkan dalam kegiatan-kegiatan pendampingan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Jumlah pegawai yang kurang memadai ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan tidak maksimal.

3.3. Upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Memecahkan Faktor Pendukung

Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sangat penting sebagai koordinator perencanaan pembangunan yang berdampak sangat luas dalam aplikasi perencanaan pembangunan akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala, yaitu partisipasi masyarakat yang pada kesempatan ini perlu adanya pembinaan dan peningkatan agar perencanaan pembangunan dapat mencapai sasaran yang diharapkan oleh masyarakat. Partisipasi ini dapat diwujudkan dengan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pembangunan yang diinginkan akan terselesaikan dan mewujudkannya secara nyata yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dibutuhkan usaha untuk menumbuhkan partisipasi yang diharapkan pada proses perencanaan pembangunan dengan adanya kemampuan komunikasi. Komunikasi yang baik dan mudah dipahami oleh segala lapisan masyarakat akan memudahkan masyarakat untuk menerima maksud dan tujuan program serta dapat memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam upaya mengatasi kendala pada faktor ekstranal, diperlukan pihak yang berkepentingan dan berpengaruh dalam proses perencanaan pembangunan. Perlunya koordinasi antar stakeholder yang terlibat pada perencanaan pembangunan. Stakeholders yang memiliki kepentingan dalam perencanaan pembangunan adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Bappeda, tokoh masyarakat, pihak swasta. Secara rinci, di bawah ini akan dibahas upaya Bappeda Kabupaten Muba dalam memecahkan kendala.

1. Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat

Sosialisasi merupakan kegiatan awal yang perlu dilakkan sebagai upaya memberikan informasi, pemahaman, serta melibatkan masyarakat dalam

perencanaan pembangunan. Dengan dilaksanakannya sosialisasi, diharapkan dapat melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Hasil yang diharapkan dari kegiatan sosialisasi adalah masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan peduli untuk terlibat dalam rangkaian tahapan perencanaan partisipatif mulai dari penggalan gagasan, penyusunan serta pelaksanaan.

2. Memanfaatkan Media Komunikasi.

Partisipasi masyarakat terhadap suatu program pembangunan akan sangat bergantung pada kelancaran komunikasi informasi antara penyelenggara perencanaan pembangunan yaitu pemerintah daerah dengan penerima pembangunan yaitu masyarakat, begitu pula dengan proses perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan komunikasi dalam memberikan informasi berbagai hal. Salah satu cara penyampaian informasi dengan menyediakan papan pengumuman, spanduk informasi terkait perencanaan pembangunan yang diletakkan di setiap kantor desa dan kantor kecamatan.

3. Menjalin Hubungan dan Komunikasi yang Baik

Menjalin ralisasi adalah syarat mutlak dalam mempertahankan keharmonisan hubungan berbagai pihak. Pada kondisi perencanaan pembangunan partisipatif, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus mampu menjalin hubungan kepada masyarakat, sesama instansi pemerintah, pihak swasta dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan mempermudah dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dijalankan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Perencanaan pembangunan telah berjalan dengan baik dan mengalami perkembangan dengan munculnya kemandirian masyarakat untuk memiliki keinginan dalam memperbaiki mutu kehidupan, serta mampu memberikan solusi dalam berdiskusi tentang pembangunan daerah. Serta respon pemerintah yang menerima peran aktif dari masyarakat untuk berkontribusi dalam proses perencanaan pembangunan. Peran serta masyarakat dengan memberikan aspirasi diperoleh dari sosialisasi mengenai prosedur pelaksanaan dan ketentuan mengenai proses perencanaan pembangunan yang berpedoman pada UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Dengan adanya informasi untuk memberikan aspirasi pada perencanaan pembangunan melalui sistem perencanaan daerah yang telah terlaksana sesuai dengan ketentuan dan kebijakan dari nasional. Dapat diartikan dimensi Knowlade pada perencanaan pembangunan partisipatif berpengaruh pada mewujudkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai perencanaan pembangunan partisipatif guna mewujudkan aspirasi masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kabupaten Musi Banyuasin Dapat diketahui bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif telah berjalan dengan baik sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana adanya peran Bappeda sebagai fasilitator perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat sebagai tonggak keberhasilan dengan memberikas aspirasi dan kontribusi melalui pengetahuan masyarakat mengenai kondisi lingkungan, serta tersedianya sumber daya yang ada dalam mempermudah poses pelaksanaan pencanaan pembangunan. Namun untuk merealisasikan aspirasi dari masyarakat masih diperlukan berbagai ketentuan dan kriteria prioritas pada program dan kegiatan yang akan terwujud.
2. Perencanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Musi Banyuasin dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses pelaksanaannya.
 - a. Faktor pendukung yaitu dukungan dari pemerintah, koordinasi antar instansi, dan kemauan masyarakat dalam kemajuan pembangunan.
 - b. Faktor penghambat yaitu faktor internal yang meliputi keterbatasan pengetahuan dan wawasan masyarakat, kurangnya kesediaan masyarakat serta faktor eksternal yang meliputi keadaan geografis dan kuantitas geografis pegawai yang rendah
3. Upaya yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam memecahkan kendala ialah
 - a. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
 - b. Memanfaatkan media komunikasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat
 - c. Menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga menarik informasi dari informan yang belum lengkap dan informasi yang diberikan belum semuanya sempurna untuk dijadikan bahan refrensi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Guna Mewujudkan Aspirasi Masyarakat Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musibanyuasin.

Arah Masa Depan Penelitian: (future work): Penulis menyadari masih awalnya temuan pada penelitian ini, oleh karena itu peneliti berharap dan menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Guna Mewujudkan Aspirasi Masyarakat Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuasin beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

- Bhattacharjee, A. 2012. *Social Science Research: Principles Methods and Practices*. USA: Creative Commons Atribusi.
- Cresswell, J. W. 2014. *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. United State of America: Sage.
- Fung, A. 2006. *Varieties Of Participation Complex Governance*. Cambridge: Public Administration Review.
- Handoyo, B. H. C. 1998. *Otonomi Daerah Titik Berat Otonomi dan Utusan Rumah Tangga*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Hardjanto, I. 2011. *Teori Pembangunan*. Malang: UB Press.
- Kartasmita, G. 1997. *Kemiskinan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- McGee, R. 2002. *International Workshop On Participatory Planning Approaches For Local Governance*. Bandung: Logo Link.
- Muchlis Hamdi, S. I. 2014. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Humaniora.
- Ndraha. 1990. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Neuman, W. L. 2006. *Social Research Method: Qualitative and Quantitative*. USA: Allyn and Buccon.
- Sastroptero. 1986. *Partisipasi, komunikasi, persuasi dan disiplin dalam pembangunan nasional*. Bandung: Alumni.
- Siagian, S. P. 1982. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Slamet. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Universitas Sebelas Maret

- Press.
- Soetrisno, L. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soetomo. 2008. *Masalah Sosial dan Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RnD*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarto. (2003). *Inovasi, Partisipasi, Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tjokroamidjojo, B. (1992). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: HajiMasagung.
- , 2005. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: BLP3ES.
- Umar. (2004). *Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Walliman, N. (2011). *Research Method The Basic*. Amerika Serikat: Routledge.
- Widodo. (2019). *Pendekatan Baru Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Yin, R. K. (2011). *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guil Ford Press.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

3. Jurnal

Akbar, M. F., Suprpto, S., dan Surati, S. 2018. *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo*, Jurnal

- Ilmu Administrasi Vol 6(2), 135. , Gorontalo : Publik.
- Čiegis, R., dan Gineitienė, D. 2008. *Participatory aspects of strategic sustainable development planning in local communities: Experience of Lithuania*. Lithuania: Technological and Economic Development of Economy, Vol 14(2), 107–117.
- Cohen, J. And Uphoff, N. 1980. *Participation's Place In Rural Development*. USA: Word Development.
- Deviyanti, D. 2013. *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karangjati Kecamatan Balikpapan*. e- Journal Administrasi Negara Vol 1 (2), 380-394. Makasar : PublikA
- Hardianti, S., Muhammad, H., dan Lutfi, M. 2017. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa Di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota)*. Tojo Una-Una: E Jurnal Katalogis, Vol 5(1), 120–126.
- Isbandi. 2007. *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karangjati Kecamatan Balikpapan Tengah*. EJournal Administrasi Negara, Vol 1(2), 27.
- Mustanir, A., Barisan, B., & Hamid, H. 2017. *Participatory Rural Appraisal As The Participatory Planning Method Of Development Planning*. Jakarta: IAPA
- Mustanir, A., dan Lubis, S. 2017. *Participatory Rural Appraisal in Deliberations of Development Planning*. Rappang: Atlantis Press,
- Starc, N., & Stubbs, P. 2014. *No island is an island: Participatory development planning on the CROATIAN ISLANDS*. Croatia: International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol 9(2), 158–176. Croatia: Witpress
- Surkati, A. 2012. *Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerjasama antar Daerah*. Vol XXVII, 39–46. Banten : MIMBAR
- Teja, Mohamad. 2015. *Development for Welfare Society in Coastal Area*. Jurnal Aspirasi, Vol 6(6), 63–76. Pontianak : Universitas Tanjungpura
- Wibowo, R. F., & Rostyaningsih, D. (2016). *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang (Studi Kasus di Kecamatan Gunungpati)*. Journal Of Public Policy And Management Review, Vol 5(4). Semarang : Universitas Diponegoro
- Zuhriansyah, M. 2013. *Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan*. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal*.

D. Sumber Lainnya

Badan Pusat Statistika Kabupaten Musi Banyuasin. 2021. *Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2021*.

Dokumen RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021.

Wawancara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

